



RENCANA KERJA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

2025



LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA BOGOR

Nomor : 20 TAHUN 2024

Tanggal : 4 JULI 2024

Tentang : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA
BOGOR TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. Renja OPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
2. Renja merupakan acuan OPD untuk memasukkan program kegiatan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2025;

3. Renja OPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/ kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2025.

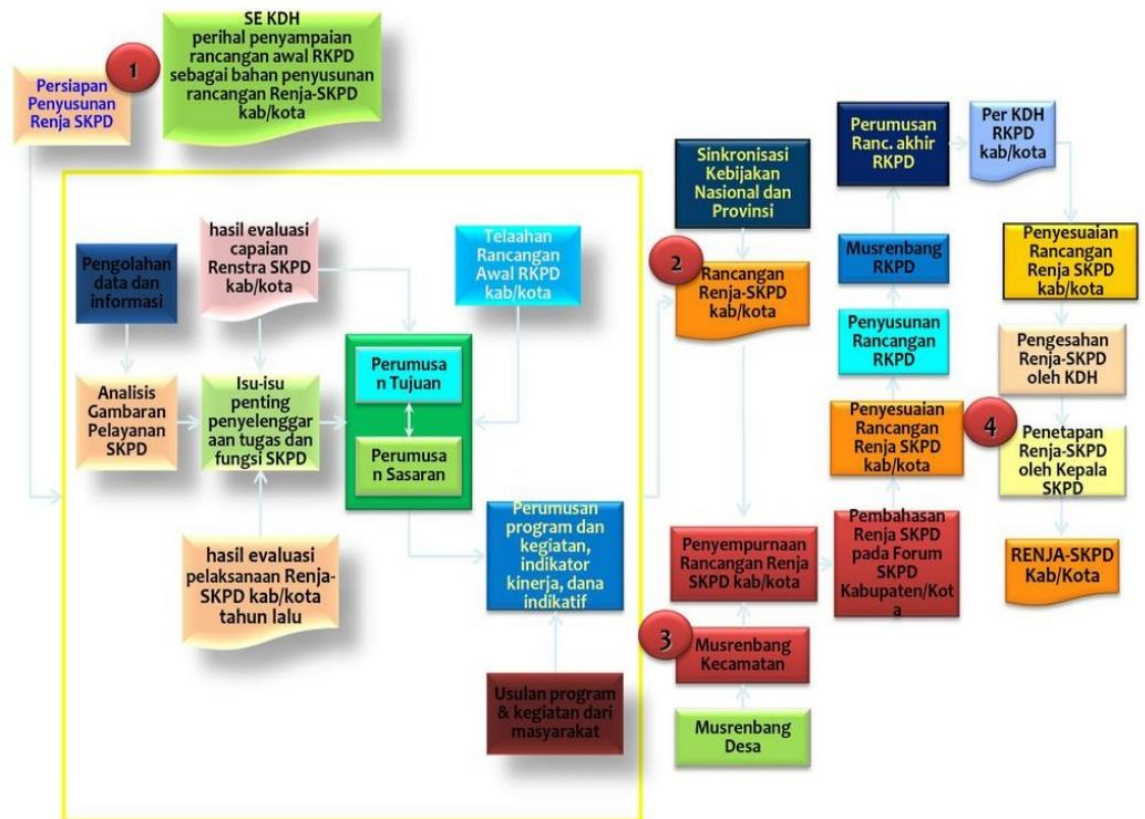
Mengingat arti strategis Dokumen Renja OPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja OPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor : 14 tahun 2019 tentang RPJMD Tahun 2019-2025 sehingga perlu disusun Perubahan rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2025 dan perlu disusun juga Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun anggaran 2025.

Rencana Kerja Tahun 2025 disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.

Dalam rangka melaksanakan tanggung jawab tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan sektor lingkungan hidup. Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perda Kota Bogor no 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Bogor dan Peraturan Walikota No 162 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Program dan Kegiatan dalam Renja OPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang 3. Program dan Kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil, indikator kinerja program (outcome) , indikator kinerja kegiatan (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju. Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana tercantum dalam Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja OPD Kabupaten / Kota



Rancangan Renja PD dibahas pada forum PD dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi PD berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan, pokok-pokok pikiran dewan, penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan antar PD

dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing PD. Renja PD ditetapkan melalui keputusan Walikota. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun $n+1$.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup menyusun Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup. Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada RKPD Kota Bogor Tahun 2025. Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan Renja.

Selanjutnya Renja Dinas Lingkungan Hidup dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD dan kemudian berubah menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) melalui penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Bogor.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bogor yang dibebani tugas melaksanakan sebagian fungsi pemerintahan daerah Kota Bogor di bidang Lingkungan Hidup, yang eksistensi dan kewenangannya dinyatakan

secara sah berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum, yang tertuang di dalam beberapa produk perundangan-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 48510
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5059);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan lembaran Negara Nomor : 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor tahun 2019 Nomor 11 Seri E)

11. Peraturan Walikota Nomor 162 Tahun 2021 tentang Tugas Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Tahunan ini adalah untuk memberi gambaran informasi Program, kegiatan-kegiatan serta rencana Anggaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor pada tahun 2025, baik Belanja Tidak Langsung maupun pelaksanaan Belanja Langsung.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana kerja ini adalah untuk :

1. Menjadi acuan dan pedoman dalam penyusunan kegiatan-kegiatan prioritas sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yang menjadi upaya nyata untuk memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat Kota Bogor;
2. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan tahun 2025 yang berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2025 dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Kota Bogor Tahun 2023;
3. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam dokumen perencanaan Daerah dan turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD.
4. Peningkatan kualitas perencanaan terhadap program dan kegiatan yang sistimatis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan antisipasi dampak perubahan iklim
5. Meningkatkan pelaksanaan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum bidang lingkungan hidup; dan pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan

penyelenggaraan bidang lingkungan hidup; serta penguatan lembaga Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

1.4 Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, Proses penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor, keterkaitan antara Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan dokumen RKPD dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor serta ditindaklanjuti dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor serta susunan garis besar dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun Lalu dan Capaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada penyusunan Renja sudah disahkan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun lalu dan realisasi Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mengacu pada laporan kinerja tahunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan / atau realisasi APBD untuk Dinas yang bersangkutan.

Tabel yang perlu disajikan dalam bagian ini adalah tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor dan Pencapaian Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (tabel 1).

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup kota Bogor

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- c. Dampaknya terhadap pencapaian RPJMD dan terhadap capaian program nasional seperti SPM.
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda; dan
4. Lampiran tabel berikut, Tabel T-C.31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai :

- a. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program / kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh.
- b. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional dan Propinsi

Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan sebagaimana dimaksud yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan hidup Kota Bogor tahun 2025 dan prakiraan maju (tahun $n+1$), sebagaimana tabel 2.

Bab IV. Penutup.

Berisikan uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan, maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan dan kaidah pelaksanaan serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 serta Capaian Program sesuai dengan Renstra DLH sKota Bogor Tahun 2025-2026 mencakup 11 (sebelas) Program dengan sasaran dan indikator kinerja Sebagai berikut :

Tabel 2.1
Data Capaian Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA
1. Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	38.17	50.89	133.32
	Indeks Kualitas Udara	79.81	86.51	108.39
2. Meningkatnya Pelayanan Pelayanan Persampahan	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81.35	81.40	100.06
	Persentase Reduksi Sampah	7.90	7.98	101.01

Indeks Kualitas Air tahun 2024 mencapai 50.89 poin dari target 38,17 poin dengan capaian 133.32%. Penghitungan IKA dilakukan dengan pekerjaan Pengujian dan Analisa Kualitas Air Sungai dan Situ pada Musim Penghujan dan Musim Kemarau. Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor dengan Metode Indeks Pencemaran (IP) dengan menggunakan 8 parameter yang diuji (Permen LHK Nomor 27 Tahun 2021). Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Air yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Indeks Kualitas Udara tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 86.51 poin atau tercapai 108.39%. Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Umumnya, didasarkan pada 5 (lima) komponen utama: Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO2) dan sulfur dioksida (SO2). Program yang mendukung pencapaian indikator Indeks Kualitas Udara yaitu Program Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Program Keanekaragaman Hayati

Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 81,40% atau mencapai 100,06%. Program yang mendukung pencapaian Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA yaitu Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

Persentase reduksi sampah tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 7,98% dari target sebesar 7,90 atau mencapai 101,01%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Program yang mendukung pencapaian Persentase Reduksi Sampah yaitu Program Pengelolaan Persampahan, Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Sampah, Peningkatan, Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Untuk Masyarakat, Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Tabel 2.2
Realisasi Keuangan DLH Tahun Anggaran 2024

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			14.197.353.140	13.142.241.164	92,56
		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota		14.197.353.140	13.142.241.164	92,56
			Pembangunan	1.060.880.000	534.060.497	50,34

			TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
			Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.669.364.600	1.448.427.828	86,76
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	1.787.899.700	1.619.722.822	90,59
			Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	9.679.208.840	9.540.030.017	98,56
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			109.093.841.42		
		Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		118.990.000	118.379.300	99,48
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.990.000	118.379.300	99,48
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		35.534.118.051	35.036.612.859	98,59
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	35.424.198.051	34.946.272.859	98,65
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	109.920.000	90.340.000	82,18
		Administrasi Umum Perangkat Daerah		1.785.809.300	1.671.447.267	93,59
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	859.126.600	846.657.600	98,54
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	84.686.800	79.427.850	93,79
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	362.310.000	322.835.000	89,10
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.015.099	94.374.000	94,35
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	379.670.801	328.152.817	86,43
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		593.543.600	586.415.000	98,79
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	593.543.600	586.415.000	98,79
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		43.316.462.688	41.557.178.277	95,93
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	354.355.000	343.781.087	97,01
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.962.107.688	41.213.397.190	95,92
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.744.917.789	23.122.564.084	83,33
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	26.957.289.789	22.410.440.632	83,13
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	496.788.000	468.918.807	94,39
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	290.840.000	243.204.645	83,62
3	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			678.840.000	662.159.300	97,54
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan		235.840.000	223.606.300	94,81

		Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				
			Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	235.840.000	223.606.300	94,81
		Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota		443.000.000	438.553.000	98,99
			Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	443.000.000	438.553.000	98,99
4	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			1.040.948.000	1.003.026.950	96,35
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		940.948.000	908.035.800	96,50
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	790.948.000	773.069.100	92,68
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	150.000.000	134.966.700	89,97
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		100.000.000	94.991.150	94,99
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	100.000.000	94.991.150	94,99
5	Program Pengelolaan Keanekaragama n Hayati (KEHATI)			150.000.000	146.912.340	97,94
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		150.000.000	146.912.340	97,94
			Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	150.000.000	146.912.340	97,94
6	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			146.536.400	128.585.907	87,75
		Penyimpanan Sementara Limbah B3		146.536.400	128.585.907	87,75
			Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	146.536.400	128.585.907	87,75
7	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan			150.000.000	148.664.540	99,10

	Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)					
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	148.664.540	99,10
			Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	148.664.540	99,10
8	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			449.851.500	441.529.020	98,14
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		449.851.500	441.529.020	98,14
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	7.851.500	7.171.500	91,33
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye lingkungan Hidup	193.500.000	190.087.720	98,23
			Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	248.500.000	244.269.800	98,29
9	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			507.325.000	498.275.500	98,21
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		507.325.000	498.275.500	98,21
			Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	507.325.000	498.275.500	98,21
10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			30.000.000	28.700.988	95,66
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		30.000.000	28.700.988	95,66
			Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/ Kota	30.000.000	28.700.988	95,66
	Program			9.061.922.000	8.805.338.321	97,16

11	Pengelolaan Persampahan					
		Pengelolaan Sampah		9.061.922.000	8.805.338.321	97,16
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	7.707.335.000	7.496.465.570	97,26
			Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah	1.132.084.500	1.121.217.751	99,04
			Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah	222.502.500	187.655.000	84,33
J U M L A H				135.506.617.468	127.098.030.817	93,79

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Program	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun					Realisasi Setiap Tahun			
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023
(1)	(2)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dibangun	NA	NA	0,01	0,01	0,01	NA	0,01	0,01	0,01
		Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang direhabilitasi	NA	NA	0,02	0,02	0,02	NA	0,02	0,02	0,02
		Presentase TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	NA	NA	100	100	100	NA	100	100	100
		Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	NA	NA	100	100	100	NA	100	100	100
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Reduksi sampah (%)	NA	NA	6,80	6,6	7,20	7,61	6,60	7,80	7,81
		Presentase volume Sampah terangkut (%)	NA	NA	77,00	77,50	78,00	77,20	74,50	81,30	79,03
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	NA	NA	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80	48,80
		Persentase peningkatan retribusi persampahan	NA	NA	2,10	2,10	2,10	2,10	2,10	2,86	6,96
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Tingkat Indeks Kualitas Air (%)	NA	NA	36,17	37,17	38,17	56,33	49,70	51,39	46,67
		Tingkat Indeks Udara (%)	NA	NA	79,63	79,72	79,81	80,09	86,00	98,36	95,92
		Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	NA	NA	7,11	7,72	7,98	3,92	5,87	7,11	7,72

4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan, ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	NA	NA	34	38	39	37	30	54,55	57,14
5	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100
6	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	NA	NA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase kegiatan usaha yang memenuhi pengelolaan limbah B3	NA	NA	50	60	70	30	40	60	65
8	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	NA	NA	100	100	100	100	100	100	100
9	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	NA	NA	30	40	50	11	20	31,49	40,38
10	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	6.8	7.2	7,94	9,26	10,59	5,29	6,62	16,8	18,98
		Persentase sekolah Adiwiyata (%)	30	30	35	36	38	30	33	32.05	35.56
11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup	BB	BB	A	A	A	BB	BB	A	A
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Operasional Perangkat Daerah daerah	100	100	3,35	3,4	3,5	3,14	3,34	3,34	3,34
		Presentase capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah per urusan	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Dari table 2.1 diatas dapat terlihat capaian realisasi Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Tahun 2024.

Faktor-faktor penyebab tercapainya kinerja program/kegiatan/Sub Kegiatan :

A. Program Pengelolaan Persampahan

a. Pada Tahun 2024 reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 7,81% dari target sebesar 7,8 atau mencapai 100,28%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, persentase reduksi sampah dapat terealisasi sebesar 98,87%. Reduksi sampah merupakan upaya mengelola sampah yang tidak terangkut ke TPA dengan pengelolaan sampah berbasis Reduce Reuse Recycle (3R). Capaian reduksi sampah dihasilkan dari 30 lokasi pengelolaan sampah di TPS 3R yang berasal dari pengelolaan sampah organik dan sampah an organik serta dari Bank Sampah yang ada di Kota Bogor sebanyak 171 Bank Sampah Unit (BSU) yang berada di setiap Kelurahan di Kota Bogor.

b. Pada Tahun 2024 Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA dapat terealisasi sebesar 79,03% dari target sebesar 81,30% atau mencapai 97,15%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD.

B. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

• Kolaborasi kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dengan beberapa lembaga/komunitas lingkungan diantaranya adalah:

a. Kerjasama Pemerintah Kota Bogor (Dinas Lingkungan Hidup) dengan Kelompok Peduli Lingkungan Hidup Harmoni dengan pemberian hibah Hibah Bansos untuk mendukung program pemerintah dalam kegiatan membantu mengedukasi masyarakat mengenai lingkungan hidup dengan kegiatan:

- Pengadaan Sarana Prasarana
- Kegiatan Pembekalan
- Sosialisasi Sampah Rokok
- Sosialisasi Keselamatan Masyarakat
- Pembinaan

- Sarasehan Remaja Peduli Lingkungan

- a. Kegiatan Penyuluhan juga dilakukan atas permohonan dari pihak lembaga pendidikan dan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup (Pengelolaan Sampah) diantaranya di beberapa sekolah di Kota Bogor seperti SD, SMP dan SMA BPK Penabur Bogor, SD Bogor Raya, SD Polisi, SD Rimba 3 dll.

C. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan

Indeks Kualitas Air tahun 2023 mencapai 46,67 poin dari target 37,17 poin dengan capaian 125,56%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD, capaian indeks kualitas air yaitu telah tercapai 122,27%. Capaian tersebut walaupun sangat baik tapi menurun 4,72 Poin dari tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya sumber pencemar di titik lokasi pemantauan air sungai yang didominasi oleh sampah yang berasal dari limbah domestik permukiman masyarakat di sepanjang aliran sungai, limbah dari kegiatan café/restoran/rumah makan di lokasi situ, serta adanya beberapa rumah yang membuang air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia) atau yang biasa disebut sebagai limbah hitam langsung ke badan sungai. Selain itu juga pada lokasi pengujian situ gede dan situ panjang berdekatan dengan lahan pertanian sehingga dari kegiatan pertanian tersebut dapat mempengaruhi kualitas air situ.



Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung berdasarkan hasil pengujian kualitas air sungai pada 30 lokasi di DAS Ciliwung, DAS Cisadane, dan Sungai Angke. Pengujian tersebut dilakukan 2 kali dalam setahun yaitu pada musim penghujan dan musim kemarau.

Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI Baku Mutu Air Nasional untuk Air Sungai dan Sejenisnya Kelas 2.

Penentuan Indeks Kualitas Air (IKA) Sungai Kota Bogor Tahun 2023 ini dilakukan dengan menggunakan metode Indeks Pencemar (IP) dengan menggunakan 8 parameter yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, Nitrat, Total

Posfat dan Fecal Coliform (Permen LHK No.27 Tahun 2021) dari lokasi hulu, tengah dan hilir pada 10 lokasi pemantauan (3 sungai dan 7 anak sungai) di kota Bogor. Nilai Indeks Pencemar (IP) tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam Indeks Kualitas Air (IKA) dengan mengalikan bobot nilai Indeks dengan persentase pemenuhan baku kriteria mutu air kelas II.

Dengan menurunnya nilai IKA tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, menunjukkan bahwa limbah domestik atau rumah tangga serta kegiatan/usaha yang menghasilkan limbah tanpa dilakukan pengolahan yang dibuang ke sungai semakin meningkat. Untuk meningkatkan nilai IKA atau mempertahankan agar tidak semakin menurun, telah dilaksanakan berbagai upaya yaitu adanya kewajiban untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke lingkungan baik yang berasal dari kegiatan masyarakat ataupun dari kegiatan usaha. Selain itu juga bagi air limbah yang sudah diolah dan memenuhi baku mutu, hanya dapat dibuang ke badan air permukaan, antara lain sungai dan situ serta jika air limbah yang sudah diolah tidak dapat dibuang ke badan air permukaan terdekat, maka pilihan lain dalam membuang air limbah adalah dengan bekerja sama dengan pihak lain yang mengolah air limbah atau memanfaatkannya kembali untuk menyiram tanaman atau untuk penyiraman toilet.

Untuk mengurangi limbah yang berasal dari air limbah buangan biologis seperti kakus (berbentuk tinja manusia), Pemerintah Kota Bogor masih terus berupaya untuk menghilangkan kebiasaan buang air besar sembarangan (BABS). Bagi masyarakat yang tidak mempunyai septic tank dan yang masih mempunyai kebiasaan BABS, maka pemerintah berupaya menyediakan sarana MCK Komunal yang dilengkapi IPAL Komunal. Selain itu di dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang membangun permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah dengan system terpusat dalam skala komunal atau kawasan. Selain itu juga dilaksanakan Pembinaan dan Pengelolaan lingkungan hidup pada kegiatan atau usaha yang telah memiliki dokumen (SPPL/UKL-UPL/Amdal)

yang bertujuan untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha terkait pengelolaan lingkungan hidup serta melaksanakan sosialisasi/edukasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di sungai.

Indeks Kualitas Udara tahun 2024 dapat terealisasi sebesar 86.51 poin atau tercapai 108.39% dari target 79.81 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan salah satu instrumen untuk mengukur tingkat pencemaran udara di suatu wilayah secara nasional, provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Indeks kualitas udara pada umumnya didasarkan pada 5 (lima) komponen utama:

Ozon, partikel, Karbon Monoksida (CO), Nitrogen dioksida (NO₂) dan sulfur dioksida (SO₂). Namun dalam prakteknya dapat juga hanya menggunakan dua parameter, yaitu NO₂ dan SO₂. Dalam hal ini, parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar ataupun bahan bakar lain yang mengandung sulfur.

Capaian IKU tahun 2024 menurun 9.41 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat.



Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat mengakibatkan pencemaran udara, air dan tanah. Selain itu, aktivitas rumah tangga juga memiliki andil yang tinggi

dalam menyumbang pencemaran udara. Kegiatan rumah tangga tersebut seperti pembakaran sampah

Tahun 2024 pembinaan proklam dilakukan di 4 (empat) lokasi yaitu Kelurahan Empang dan Kelurahan Bojungkerta Kecamatan Bogor Selatan, Kelurahan Tanah Sareal dan Kelurahan Ciluar. Dari 4 (empat) lokasi binaan proklam hanya tiga yang di daftarkan ke SRN KLHK karena ketiga lokasi binaan ini sudah memenuhi kualifikasi dari Mitigasi dan Adaptasi Lingkungan.

D. Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup (PPLH).

a. Berdasarkan UU no 32 Tahun 2009 tentang PPLH Bab XII bahwa kepala daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepala daerah bisa melimpahkan kewenangannya kepada instansi bidang pengelolaan lingkungan dan didalam Perda No 1 Tahun 2014 Tentang PPLH Bab XII bahwa Walikota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha atau kegiatan atas pelaksanaan ketentuan dalam Izin Lingkungan dan Izin PPLH. Dalam pelaksanaan pengawasan Walikota melimpahkan kewenangan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

- Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan di Kota Bogor bertujuan meningkatkan pengawasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Bogor. Hasil dari kegiatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan tahun 2023 ini telah dibuatkan Berita Acara (BA) sebanyak 147 Kegiatan/Usaha dan telah ditegur melalui surat teguran 1 sebanyak 84 Kegiatan Usaha, teguran 2 sebanyak 40 Kegiatan Usaha dan Teguran III sebanyak 14 Kegiatan usaha serta ketaatan pelaku usaha 114 kegiatan usaha.

E. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

- Pengadaan bibit tanaman Rambutan, Kemang, Mangga, Sukun, Nangka, Durian, Alpukat, Sengon dan Pala. Bibit tanaman ini didistribusikan kepada Masyarakat, yaitu SDN Bondongan, RW.13 dan RW.08

Kelurahan Kencana Kecamatan Tanah Sareal, Korem 0606 Suryakencana, Danau Bogor Raya dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) SeKota Bogor.

- F. Pengendalian bahan Berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
- G. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang Telematika (Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi SIMPELA B3)

Maksud kegiatan dari Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 di Kota Bogor (SIMPELA B3) untuk memfasilitasi kegiatan usaha di Kota Bogor yang menghasilkan Limbah B3. Sasaran kegiatan berikut adalah memperbarui Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 (SIMPELA B3), sesuai dengan pencatatan dan pelaporan, serta neraca ter-update dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Output kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3 (SIMPELA B3) di Kota Bogor.
 - b. Tersedia Laporan Bulanan dan Neraca Limbah B3.
 - c. Laporan yang dihasilkan dari pekerjaan ini adalah Buku Manual SIMPELA B3. Laporan dicetak hitam putih, ukuran kertas A5 dengan softcover berwarna, sebanyak 30 eksemplar.
- H. Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik (Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sampah Spesifik Rumah Tangga di Kota Bogor)
Maksud kegiatan Kajian Inventarisasi dan Identifikasi Sampah Spesifik Rumah Tangga di Kota Bogor ini adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi sampah spesifik yang mengandung B3 dan/atau Limbah B3 di lingkungan sekolah negeri tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK dan pusat perbelanjaan (*mall*) di wilayah Kota Bogor.
 - I. Mendapatkan penghargaan Juara ke-3 di ajang Bogor Innovation Award 2023 Nama Inovasi: Aplikasi SIMPELA B3 (Sistem Informasi Pelaporan Limbah B3)

J. Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Tahun 2024 terdapat sejumlah 6 pengaduan dugaan pencemaran yang masuk dari masyarakat kita tindak lanjuti untuk dilakukan verifikasi oleh tim dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah tidak tenaga pejabat pengawasan lingkungannya mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu, selain itu kurangnya tenaga dibidang pengawasan.

Selain itu permasalahan lainnya adalah adanya ketidakseimbangan antara jumlah kegiatan usaha yang harus dipantau dengan jumlah aparatur pelaksana pemantauan. Namun upaya yang dilakukan secara maksimal dengan meningkatkan pemantauan dan pengawasan pada pelaku usaha dalam hal ketaatan pengelolaan lingkungan sesuai dengan berpedoman pada dokumen dan peraturan perundangan yang berlaku, maka pengendalian beban pencemaran lingkungan diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan sasaran pemantauan dapat berjalan sebagaimana mestinya

K. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Rukun Tetangga Peduli Lingkungan

Kegiatan pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Kota Bogor dilaksanakan melalui program kegiatan Bogorku Bersih yang setiap tahunnya dilaksanakan di Kota Bogor. Untuk Tahun 2024 kegiatan Bogorku Bersih dimulai sejak bulan Februari sampai bulan November 2024 yang diikuti oleh 782 peserta dengan perincian peserta :

- 680 RT
- 50 SD
- 21 SMP
- 24 Bank Sampah

- 35 OPD

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan penghargaan kepada RT terbaik yang memenangkan lomba kebersihan Bogorku Bersih sehingga Kota Bogor bisa bebas dari permasalahan sampah. Puncak kegiatan penganugrahan Bogorku Bersih dilaksanakan pada tanggal 27 November 2023 di IPB International Convention Center (IICC) Botani Square. Kategori yang dilombakan adalah:

1. Permukiman Teratur
2. Permukiman Swadaya
3. Permukiman Tepi Sungai
4. OPD
5. Bank Sampah
6. Sekolah

L. Perencanaan Lingkungan Hidup

Penyusunan Dokumen RPPLH yang merupakan dokumen perencanaan memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu (30) tahun. berdasarkan amanat dari Undang undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Surat Edaran Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SE.5/Menlhk/PKTL/PLA.3/11/2016 dengan melakukan inventarisasi Lingkungan Hidup untuk memperoleh data dan informasi Sumber Daya Alam dengan tujuan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk dan pesatnya sektor Pembangunan Kota Bogor yang berdampak terhadap penggunaan sumber daya alam dan pemanfaatan ruang yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup.

Berikut ini merupakan kendala atau permasalahan dan pencapaian kinerja:

- A. Permasalahan di bidang Pengendalian, Pencemaran Lingkungan Konservasi dan Perubahan iklim
Nilai Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara

- Kualitas air dipengaruhi oleh sifat fisika, kimia dan biologi yang terkandung didalamnya. Perubahan kualitas air dapat dipengaruhi oleh Iklim, Geologi, vegetasi, aktivitas manusia dan waktu;
- Nilai Indeks kualitas Air sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik itu cuaca/kondisi lingkungan pada saat dilakukan pengujian kualitas air, beban pencemaran yang masuk ke badan sungai, ataupun perilaku masyarakat yang membuang sampah ke badan sungai;
- Nilai Indeks Kualitas Air pada anak Sungai Ciliwung, Cisadane dan Angke, dipengaruhi oleh berbagai pencemaran terhadap sungai tersebut. Selain limbah dari industri, limbah domestik menjadi sumber pencemar terbesar pada sungai anak Ciliwung, Cisadane dan Angke di Kota Bogor. Hasil inventarisasi sumber pencemaran air yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukkan bahwa kegiatan domestik menyumbang, sisanya kegiatan industry, rumah sakit, pertanian serta peternakan;
- Capaian IKU tahun 2023 menurun 3,04 poin dari tahun sebelumnya, hal ini salah satunya disebabkan adanya polusi dari asap kendaraan bermotor. Jumlah kendaraan bermotor semakin meningkat setiap tahunnya yang menyebabkan penggunaan bahan bakar meningkat serta kandungan gas CO juga meningkat. Limbah asap pabrik dan industri juga merupakan penyumbang terbesar pencemaran udara. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang keluar dari proses industry tersebut berupa zat yang berbahaya.

B. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya:

- Kendala dari pelaksanaan pengawasan ini adalah Tidak ada Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PLHD) yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan, meminta keterangan, membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan, memasuki tempat tertentu, memotret, membuat rekaman, mengambil sampel, memeriksa peralatan, memeriksa instansi dan/atau alat transportasi serta menghentikan pelanggaran tertentu;

- Dokumen Lingkungan yang dimiliki biasanya hanya sebagai alat untuk menempuh perijinan sehingga pelaku kegiatan tidak menjalankan kewajiban yang tercantum dalam dokumen lingkungan;
- Masih ditemukan pelanggaran-pelanggaran terkait pelaksanaan izin Lingkungan dan izin PPLH.

Upaya :

- Mengusulkan pegawai untuk mengikuti diklat fungsional pengawas lingkungan hidup;
- Menyediakan format pelaporan yang mudah diimplementasikan oleh pelaku kegiatan/usaha;
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.

C. Permasalahan yang dihadapi Bidang Pengelolaan Persampahan terkait pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, diantaranya :

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan;
- Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah di sumber;
- Menurunnya partisipasi masyarakat dalam pemilahan sampah di Bank Sampah, sehingga banyak Bank Sampah yang sudah tidak beroperasi lagi;
- Banyaknya penghasil sampah baik dari pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah dengan baik;
- Kurangnya sosialisasi masalah pengelolaan sampah.

Upaya :

- Mengajak kepada warga masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan;
- Melakukan sosialisasi pembinaan masyarakat dan sosialisasi pembinaan Bank Sampah agar masyarakat mau memilah sampah di sumber sampah;

- Membuat lomba Bank Sampah dan RW bersih dengan harapan masyarakat terpacu untuk memilah sampah dan membuat Bank Sampah;
 - Melakukan Pembinaan/Sosialisasi kepada pelaku usaha maupun rumah tangga yang belum melakukan pemilahan sampah;
 - Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung program kegiatan.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap program/kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2024, diperoleh faktor – faktor sebagai berikut:

a. Faktor – faktor pendukung pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Dukungan anggaran yang cukup bagi pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan, yang bersumber dari APBD .
- Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM aparatur pelaksana;
- Kerjasama lintas sektor untuk mempercepat ketercapaian sasaran program dan kegiatan;
- Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap ketaatan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup dan Sosialisasi kepada masyarakat terkait pengelolaan persampahan.

b. Faktor – faktor penghambat pemenuhan target kinerja program/kegiatan yaitu :

- Masih rendahnya kapasitas aparatur dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
- Terbatasnya luasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan yang dapat digunakan untuk mempertahankan kan berlangsungnya proses alamiah dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.
- Semakin meningkatnya jumlah usaha / kegiatan yang berpotensi mencemari / merusak lingkungan sehingga menjadi tantangan bagi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor untuk pemantauan dan pengawasan LH.
- Terkait tantangan bidang persampahan, dimasa datang permasalahannya akan semakin berat dengan meningkatnya jumlah

penduduk yang akan berdampak pada timbulan sampah, kualitas dan kuantitas alat angkut sampah yang belum optimal.

c. Peluang

Adapun peluang Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam pengembangan pelayanan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yaitu adalah :

1. Adanya koordinasi antar OPD lain di tingkat daerah, provinsi maupun nasional;
2. Adanya dana DAK bidang LH atau Bankeu Provinsi Jawa Barat yang dapat mendorong kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;
3. Kepedulian dan keterlibatan swasta dalam penanganan masalah lingkungan hidup melalui dana corporate social Responsibility (CSR);
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup;
5. Isu lingkungan merupakan isu global sehingga pelaku usaha dituntut untuk menerapkan teknologi ramah lingkungan.

Tabel 2.4. (T-C.29)

Rekapitulasi Evaluasi hasil Pelaksanaan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (tahun berjalan)*
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3) 2022*	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun n-1) 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1) 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)		
1	-	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1	03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG										
1	03	04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	0,01	NA	0,01	0,01	100	0,01	100	
				Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	0,02	NA	0,02	0,02	100	0,02	50	
				Presentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	100	NA	100	100	100	0,01	0	
				Presentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100	NA	100	100	100	0,01	0	
1	03	04	201	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100	NA	100	100	100	0,01	0

1	03	04	201	03	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	3300	NA	0,01	0,01	100	3300	0,01	0
1	03	04	201	04	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Direhabilitasi	10	NA	0,02	0,02	100	10	0,02	0
1	03	04	201	05	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	337658	NA	100	100	100	306266	100	0
1	03	04	201	06	Penyediaan Sarana Persampahan	Jumlah Sarana Persampahan yang Disediakan	150	NA	128	123	96%	145	96	78
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP									
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100	100	100	100	1,000	1	100	2
2	11	02	201		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Presentase dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100	100	100	100	1,000	1	100	2
2	11	02	201	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	1	100	100	1	1	1
					Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	1	NA	NA	NA	NA	1	NA	1
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	71,3	46,67	37,17	46,67	125,55	46,68		
						Indeks kualitas Udara	55,63	95,92	79,72	95,92	120,32	95,93		
						Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	7,98	7,72	7,72	7,72	100	7,72	7,98	1
2	11	03	201		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Presentase parameter kualitas air yang memenuhi baku mutu	60	NA	60	80	80	60	60	100
						Presentase kualitas udara ambien yang memenuhi baku mutu	90	NA	90	100	100	90	90	100
						Presentase Jumlah Persetujuan teknis air limbah atau emisi udara Kegiatan /usaha	90	NA	90	100	100	90	90	100

						Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3	NA	3	7	233	3	233	100
2	11	03	201	01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2	2	2	2	100	2	100	1
2	11	03	201	02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1		100	1	100	1
2	11	03	203		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	11	03	203	04	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5	0	0,5	0,516	103,2	0,5	103,2	2
2	11	04	201		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase lahan kritis publik dan private yg dikonservasi	0,3	0	0,3	0,3	100	0,3	03	2
2	11	04	201	01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1	NA	1	1	100	1	100	1
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	70	30	50	60	120	70	120	1

2	11	05	201		Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Kegiatan pembinaan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	70	30	50	60		70	70	1
2	11	05	201	02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	1	1	1	100	1	100	NA
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		38	37	34	54,55	160,44	38	39	1
2	11	06	201		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		156	102	134	134	100	149	100	1
2	11	06	201	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1	NA	1	1	100	1	1	1
2	11	06	201	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1	NA	1	1	1	1	1	1
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Kerjasama dengan Komunitas Lingkungan dan Pelaku Usaha	40	11	30	31,49	104,97	40	104,97	1
2	11	08	201		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah melakukan pengelolaan lingkungan	90	NA	90	94	104,4	90	104,4	1
						Jumlah Lembaga masyarakat yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	20	NA	20	40	200	30	200	1

2	11	08	201	01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	10	NA	8	40	400	10	400	1	
2	11	08	201	02	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50	NA	NA	NA	NA	50	50	1	
2	11	08	201	03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	300	NA	NA	NA	NA	200	200	1	
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Rukun Tetangga Peduli Lingkungan	10,29	5,29	7,94	16,8	211,57	9,26	211,57	1	
						Persentase sekolah Adiwiyata (%)	38	30	33	33	100	35	35	1	
2	11	09	201		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/Masyarakat/Lemabaga Masyarakat /Dunia Usaha/Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	300	NA	300	611	203,7	300	203,7	1	
2	11	09	201	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	16	NA	16	8	50	16	50	1	
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran/ kerusakan Lingkungan Hidup Yang ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	1
2	11	10	201		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat akibat dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	1

2	11	10	201	01	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	1	100	100	100	100	1	100	1
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	7,20	6,89	6,8	7,8	114,7	6,8	114,7	1
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	77	81,3	105,58	77,5	105,58	1
						Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	48,8	48,8	48,8	48,8	100	48,8	48,8	1
						Persentase peningkatan retribusi persampahan	2,1	2,1	2,1	2,86	136,19	2,1	136,19	1
2	11	11	201		Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah Sampah yang dikelola di TPS 3R	100	NA	100	100	100	100	100	1
						Persentase Pengelolaan Sampah an Organik yang dikelola di Bank Sampah	50	NA	50	50	100	50	100	1
						Persentase Volume sampah terangkut ke TPA	78	77,04	100	100	100	50	100	1
2	11	11	201	02	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	3	NA	2	3	100	2	100	1
2	11	11	201	03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Terlaksananya Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pemngangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA kabupaten/Kota	530	522	525	536,403	102,17	526	102,17	1
2	11	11	201	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarna Penanganan Sampah untuk kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, pengangkutan, Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir	9	7	8	8	100	8	100	1
2	11	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Perangkat Daerah	A	100	A	A		A	A	

						Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Lingkup Perangkat daerah	3,5		3,4	3,507	103,15	3,5	103,15	
2	11	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup DLH	A	100	A	A		A	A	
2	11	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	0	3	4	133	3	4	1
2	11	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	0	7	8	114	7	8	1
2	11	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100	0	100	100	100	100	100	1
2	11	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	302	304	304	304	1,000	302	302	1
2	11	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional perangkat daerah	100	100	100	100	1,000	100	100	3
2	11	01	206	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5	100	5	5	100	5	100	41
2	11	01	206	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	100	2	2	100	2	100	101
2	11	01	206	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	100	4	4	100	4	100	102
2	11	01	206	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	100	1	1	100	1	100	201
2	11	01	207		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100	100	100	100	100	100	100	3
2	11	01	207	01	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12	NA	10	10	1,000	10	10	1
2	11	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100	NA	100	100	1,000	100	100	1

2	11	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	11	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	12	1,000	12	36	3
2	11	1	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	135	100	100	100	100	135	100	1
2	11	1	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	1	100	1	100	1
2	11	1	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	NA	6	8	133,3	6	133,3	1

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian kinerja pelayanan OPD Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor terlihat dalam tabel T-C.2.3 berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor.

Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan dukungan bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaa administrasi dibidang lingkungan hidup;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan di dinas Lingkungan Hidup yaitu :

- a. Penyelenggaraan urusan umum, keuangan, dan penyusunan rencana Kegiatan;
- b. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kota Bogor;
- c. Melaksanakan inventarisasi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis, kajian dampak lingkungan;
- d. Pengelolaan Keanekaragaman hayati Kota Bogor;
- e. Penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kota Bogor;
- f. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk kelembagaan kemasyarakatan Daerah kota Bogor;
- g. Pemberian penghargaan lingkungan hidup daerah kota Bogor;
- h. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- i. penyelesaian pengaduan; dan
- j. pengelolaan sampah.

Tabel 2.5 (T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup
Kota Bogor

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasai Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			2020 (thn n-2)	2021 (thn n-1)	2022 (thn n)	2023 (thn n+1)	2025 (thn n+1)	2021(thn n-2)	2022(thn n-1)	2023 (thn n)	2025 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	NA	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	NA	0,01	0,01	0,01	
		NA	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	NA	0,02	0,02	0,02	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
		NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	NA	100	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air	49,67	35,17	36,17	37,17	38,17	51,67	56,33	37,17	38,17	
		Indeks Kualitas Udara	85,900	79,532	79,626	79,720	79,814	81,76	80,09	79,720	79,814	
		7,72	3,92	5,87	7,11	7,72	7,98	-	3,92	7,72	7,98	
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	NA	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	

5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	NA	30	40	50	60	70	120	30	50	60	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap ijin lingkungan , ijin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	26	30	34	38	39	100	50	38	39	
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	20	20	30	40	50	10	20	40	50	
			10	20	30	40	50	11	10	40	50	
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	NA	5,29	6,62	7,94	9,26	10,59	3,97	5,29	9,26	10,59	
		NA	31	33	35	36	38	30	31	36	38	
9	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	NA	6,4	6,6	6,8	7,0	7,2	6,89	7,61	7,0	7,2	
		Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah	74,00	74,50	75,00	75,20	75,50	75,85	81,19	77,50	78	

		Kabupaten / Kota										
		NA	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	
		NA	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	NA	3,2	3,34	3,34	3,4	3,5	3,2	3,2	3,4	3,5	
		NA	B	BB	BB	A	A	BB	BB	A	A	

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Tahun 2023		Catatan Analisis
		Target	Realisasi	
1	Indeks Kualitas Air	37,17	46,67	
2	Indeks Kualitas Udara	79,72	95,92	
3	Persentase Volume Sampah Terangkut ke TPA	81	79,03	
4	Persentase Reduksi Sampah	7,8	7,81	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas lingkungan Hidup Kota Bogor

Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 ditetapkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Perubahan formal yang terjadi adalah rincian detil bidang urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah.

Dengan terbitnya UU tersebut tidak banyak terjadi perubahan terhadap pembagian urusan antara Pemerintah yang berimplikasi terhadap perubahan sub-sub urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kab/Kota. Oleh karenanya, dari sisi kewenangan tidak terjadi perubahan yang sangat drastis terkait kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam urusan bidang lingkungan hidup dan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH akan dipaparkan berdasarkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor sesuai dengan Perwali nomor 162 tahun 2021.

Pembahasan permasalahan pelayanan Dinas LH secara spesifik akan diklasifikasikan menjadi urusan pemerintahan Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan, Konservasi dan Perubahan Iklim, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan, serta UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.

Isu adalah permasalahan yang dijumpai dan menjadi suatu opini publik yang harus segera dicari penyelesaiannya. Isu ini dapat berskala makro atau skala mikro. Isu-isu yang berkembang di masyarakat harus didukung oleh data-data yang valid, sehingga bukan isu yang tanpa dasar.

Strategis merupakan hal sangat penting, mendasar dan prioritas yang menghasilkan efek tertentu dan sangat menentukan kondisi selanjutnya.

Isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dan degradasi lingkungan. Antisipasi terhadap kondisi ini pada masa depan adalah dengan melakukan berbagai tindakan yang tepat serta menjalankan aturan dan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dan pengendalian lingkungan.

Isu lainnya adalah mengatasi semakin meningkatnya pencemaran lingkungan dan pemanasan suhu udara akibat polusi yang ditimbulkan oleh semakin meningkatnya kendaraan bermotor dan proporsi ruang terbangun. Oleh karena itu diperlukan integrasi dengan tantangan transportasi dan tata ruang yang ramah lingkungan.

Adapun permasalahan mendesak yang harus segera ditangani terkait dengan kondisi lingkungan di Kota Bogor adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sampah yang belum terpadu

Permasalahan yang terjadi adalah pengelolaan sampah yang belum terpadu. Sampai saat ini sampah masih menjadi permasalahan yang belum terpecahkan khususnya di kota-kota besar, permasalahan yang timbul terutama karena

- a. Besarnya volume sampah yang berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi
- b. Keterbatasan untuk pembuangan akhir sampah, sampai saat ini Kota Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) masih terletak di Kabupaten Bogor.
- c. Teknik pengolahan sampah yang masih konvensional.

Dari segi estetika sampah menjadi hal buruk yang merusak pemandangan serta bau yang tidak sedap , Sampah yang dihasilkan di

Kota Bogor berasal dari aktivitas rumah tangga, sampah pasar, sampah pertokoan, sampah fasilitas umum dan sampah industry. Secara umum, peningkatan pelayanan sampah di Kota Bogor didukung oleh peningkatan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam mengelola sampah dan disertai peningkatan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah secara 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*).

2. Masalah Pencemaran Air

a. Pencemaran Air Tanah

Air tanah atau air bawah permukaan, berdasarkan letak, sifat dan kondisinya fisiknya dapat dikelompokkan ke dalam air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal terdapat pada akuifer dan pada bagian atasnya tidak tertutup oleh lapisan kedap air. Air tanah dalam dijumpai pada sumur-sumur bor. Kedalaman permukaan air tanah sangat ditentukan oleh topografi setempat, yaitu pada tempat bertopografi rendah, dan pada tempat dengan topografi tinggi.

b. Pencemaran Air Permukaan

Air permukaan adalah badan air yang terbuka yang dapat berupa sungai atau situ. Sumber pencemaran terhadap air permukaan di Kota Bogor terutama adalah pabrik, rumah sakit, pusat perbelanjaan, restoran, dan rumah tangga yang membuang limbahnya langsung ke badan air. Limbah tersebut dapat menurunkan kualitas fisik, kimia dan biologis air sungai atau situ.

Hasil pemantauan parameter pencemaran di bagian hilir, tengah dan hulu sungai Cisadane dan Sungai Ciliwung beserta anak-anak sungainya dimana masih ada yang menunjukkan bahwa kandungan BOD, COD, kekeruhan dan coli tinja pada titik pemantauan relative tinggi. Demikian juga hasil pengukuran pada inlet dan outlet Situ Gede dan Situ Panjang. Kandungan coli tinja yang tinggi menyebabkan badan air tersebut tidak layak untuk keperluan rumah tangga, terutama mandi dan mencuci bahan makanan.

3. Masalah Pencemaran Udara dan Kebisingan

Pencemaran udara dapat berupa meningkatnya kandungan debu, polutan atau timbulnya bau yang tidak sedap di udara. Debu timbul dari aktivitas transportasi dan kegiatan pembangunan fisik yang menimbulkan penimbunan, pembongkaran bangunan. Pencemaran udara akibat debu sifatnya fluktuatif, dan intensitasnya tinggi terutama pada musim kemarau. Sedangkan pada musim penghujan relative rendah karena partikel debu akan larut oleh air hujan.

Polutan udara umumnya bersumber dari sisa pembakaran sumber energi dalam aktifitas permukiman, transportasi dan industri. Polutan yang banyak menjadi masalah dari aktivitas terutama adalah CO, Timbal (Pb), Hidrokarbon, SO₂, H₂S dan NH₃.

Sumber utama pencemaran udara dan kebisingan di Kota Bogor adalah aktivitas transportasi. Tingginya arus transportasi terutama angkutan umum telah menimbulkan pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. Berdasarkan uji pemantauan di beberapa lokasi sample menunjukkan bahwa peningkatan kandungan NO₂ pada beberapa lokasi telah melampaui baku mutu lingkungan. Demikian juga untuk senyawa lain seperti CO dan Hidrokarbon.

Berdasarkan hasil pemantauan selama tiga tahun terakhir tingkat kebisingan yang terjadi di Kota Bogor disebabkan oleh aktivitas transportasi dan industri.

4. Pencegahan Dampak Lingkungan

Upaya untuk meminimalkan dampak yang terjadi serta menghindari penurunan kualitas lingkungan maka upaya preventif harus dilakukan mengingat perbaikan lingkungan memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar. Upaya pencegahan dimulai dari awal aktivitas antara lain: Rencana Pembangunan di Kota Bogor diharuskan dilengkapi dengan dokumen lingkungan berupa: AMDAL, UPL-UKL, SPPL yang dapat membantu Pemda dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi bahan acuan pengawasan. Pemantauan dan pengawasan dari pelaksanaan AMDAL, UKL-UPL, SPPL, dilakukan setiap tahun untuk kegiatan atau usaha dan dituangkan dalam monitoring dan evaluasi.

Mengacu Pasal 22 angka (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pasal 22 angka (1) tersebut menentukan setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki Amdal/UKL/UPL. Amdal merupakan bagian dari sistem perencanaan, Amdal/UKL/UPL seharusnya dapat memberikan landasan bagi pengelolaan lingkungan dan gambaran yang jelas secara ilmiah tentang analisis kegiatan dan dampak yang mungkin akan timbul oleh sebuah kegiatan.

5. Pengendalian Perubahan Iklim

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kondisi geografis yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia menandatangani Perjanjian Paris pada kesempatan pertama tanggal 22 April 2016 di New York. Penandatanganan dilanjutkan dengan proses ratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Ratifikasi Paris Agreement. Berdasarkan Paris Agreement, Indonesia menargetkan penurunan emisi (Nationally Determined Contribution) pada tahun 2030 sebesar 29% dengan upaya sendiri, dan 41% dengan bantuan internasional. Komitmen Indonesia di tingkat internasional tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan nasional maupun daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Rancangan Awal RKPD tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup telah sesuai dengan Program/Kegiatan yang ada di RPJMD Kota Bogor tahun 2025-2026 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025;
2. Hasil analisa kebutuhan untuk tahun 2025 telah menggunakan Kepmendagri nomer 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
3. Setelah dilakukan pemetaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025 semua kegiatan telah terdefiniskan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur nya.

Tabel 2.7. (T-C. 31)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kota Bogor Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Ket
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	4,17%	6.427.631.840	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	4,17%	14.805.983.440	
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	2,13%				Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	2,13%		
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	98,16%				Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	98,16%		
			Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100%				Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100%		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100%	6.427.631.840	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100%	14.805.983.440	

1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	290.000.000	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	330.000.000	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	1.298.460.371	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	9.636.811.971	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	400.000.000	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	400.000.000	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	4.439.171.469	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	4.439.171.469	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100%	262.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100%	262.000.000	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	262.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	100	262.000.000	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	262.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	262.000.000	

III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	20%	1.148.977.520	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	20%	1.148.977.520	
		Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	8%			Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	8%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air	13,88%	1.048.977.520	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air	13,88%	1.048.977.520	
		Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	11 Titik			Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	11 Titik		
		Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3 Lokasi			Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3 Lokasi		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	150.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	150.000.000	
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	898.977.520	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	898.977.520	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	100.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	100.000.000	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	

IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bogor	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5 Ha	150.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bogor	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5 Ha	150.000.000	
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pohon yang ditanami	500 Pohon	150.000.000	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pohon yang ditanami	500 Pohon	150.000.000	
9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100%	154.072.500	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100%	250.000.000	
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	93%	154.072.500	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	93%	250.000.000	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	154.072.500	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	250.000.000	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	56,32%	170.000.000	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	56,32%	170.000.000	

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	100%	170.000.000	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	100%	170.000.000	
11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan/Usaha	170.000.000	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan/Usaha	170.000.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	15%	445.730.300	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	15%	545.730.300	
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	35 Pelaku kegiatan/usaha	445.730.300	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	35 Pelaku kegiatan/usaha	545.730.300	
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	25 Lembaga				Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	25 Lembaga		

12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	95.730.300	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	95.730.300
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	150.000.000	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	200.000.000
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	200.000.000	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	250.000.000
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	35,60%	500.000.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	35,60%	500.000.000
			Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	19%				Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan	19%	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	500.000.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	500.000.000

15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	500.000.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	500.000.000	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	30.000.000	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	30.000.000	
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	30.000.000	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	30.000.000	
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	30.000.000	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	10 Pengaduan	30.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase Reduksi Sampah (%)	8%	10.347.251.100	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase Reduksi Sampah (%)	8%	28.322.094.000	
			Persentase Volume Sampah Tertangani	79,25%				Persentase Volume Sampah Tertangani	79,25%		
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	94,97%				Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	94,97%		

			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,9%				Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,9%	
	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	57,58%	10.347.251.100	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	57,58%	28.322.094.000
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	94%				Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	94%	
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	6.411.065.600	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	7.127.448.000
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.025.752.000	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.145.286.000
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	2.910.433.500	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	20.049.360.000
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27.01	106.286.773.479	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	-	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27.01	109.346.203.179
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26.55				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26.55	
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12.48				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12.48	
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21.97				Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21.97	

			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100				Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100		
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100				Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100		
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94				Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100				Persentase Kepatuhan Anggaran	100		
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95				Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95		
			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94				Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38				Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38				Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	170.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	170.000.000	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	100%				Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang	100%		

								disusun			
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	170.000.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	170.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	33.584.485.984	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	33.584.485.984	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	33.474.565.984	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	33.474.565.984	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.855.291.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.848.207.700	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	856.776.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	856.776.000	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	97.029.900	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	89.945.900	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	401.840.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	401.840.000	
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	119.999.800	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	119.999.800	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	379.646.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	379.646.000	

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	428.199.800	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	565.207.900	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	428.199.800	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	565.207.900	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	44.004.387.039	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	44.004.387.039	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.955.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.955.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.658.432.039	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.658.432.039	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	26.244.408.956	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	29.173.914.556	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	26.046.430.831	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	26.046.430.831	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.690.731	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	258.690.731	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	189.287.394	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	189.287.394	

			JUMLAH		125.922.436.739	JUMLAH				155.530.988.439	
--	--	--	---------------	--	------------------------	---------------	--	--	--	------------------------	--

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja pemerintah daerah setiap tahunnya yang disahkan melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat kelurahan sampai Musrenbang tingkat kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan renja Perangkat Daerah. Tujuan pembahasan rancangan renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Kegiatan yang merupakan usulan masyarakat dan pemangku kepentingan yang masuk forum Musrenbang baik tingkat kelurahan maupun kecamatan yang ditujukan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor tahun 2025 terdapat dalam tabel T-C.32

Usulan-usulan tersebut telah sesuai dengan isu strategis di bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup yaitu adanya ancaman terhadap krisis lingkungan pada masa depan yang diakibatkan oleh tingginya tingkat pencemaran dalam hal ini terkait dengan pengelolaan persampahan.

**Tabel 2.8. (T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025 Kota Bogor Jawa Barat**

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah				

	Kabupaten/Kota				
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	RW 04 Keluarahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		
		RW. 10 Keluarahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan		
		Kp Karya Bhakti Rt 03/rw 04 Cilendek Barat Kc Bogor Barat Kota Bogor	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	KPP IPB Baranangsiang IV Rt. 3 Rw. 10 Keluarahan Tanah Baru Kecamatan Bogor Utara	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	1 unit	

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Dokumen Renja ini memuat informasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan, meliputi program kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan rencana tingkat capaian (target) dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025. Program dan kegiatan yang disasar tersebut tidak lepas dari kerangka kebijakan nasional sehingga perlu untuk menelaahnya dan menyesuaikan dengan kebijakan baik tingkat nasional maupun provinsi.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pembangunan Kota Bogor merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Bogor yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan, baik di tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pembangunan daerah harus sejalan dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional maka diperlukan telaahan terhadap kebijakan nasional dan Provinsi.

Pokok-pokok Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 akan mengacu pada Kerangka Pembangunan Rancangan Teknokratis RPJMN 2020-2025 yang sedang disusun oleh pemerintah pusat dan juga perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam RPJPN 2005-2025. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 berpedoman pada perencanaan jangka panjang dan jangka menengahnya dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Sedangkan pada tingkat provinsi Jawa Barat, Tahun 2025 ini masih masa transisi sehingga pembangunan tidak terlepas dari program - program sebelumnya, juga mengacu RPJPD 2005 -2025 Tema Pembangunan Jawa Barat tahun 2025 adalah : "Pemerataan Pembangunan untuk Mendukung Masyarakat Jawa Barat".

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Untuk melaksanakan tugas pokok diatas Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor yang mempunyai fungsi menjalankan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup mempunyai kewenangan pada 11 sub bidang yaitu :

Tabel 3.1. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

K.PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) nasional.	RPPLH provinsi.	RPPLH kabupaten/kota.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk kebijakan, rencana dan/atau program (KRP) Nasional.	KLHS untuk KRP provinsi.	KLHS untuk KRP kabupaten/kota.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah provinsi dan/atau lintas batas negara.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati nasional.	Pengelolaan Kehati provinsi.	Pengelolaan Kehati kabupaten/kota.
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	a. Pengelolaan B3. b. Pengelolaan limbah B3.	Pengumpulan limbah B3 lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Penyimpanan sementara limbah B3. b. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi.	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
7.	Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih Daerah provinsi.</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih</p>	<p>a. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/kota.</p>

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
			Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat nasional.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota.
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat nasional.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah provinsi.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat Daerah kabupaten/kota.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan	Penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang PPLH terhadap: a. usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Pusat. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah provinsi.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah provinsi. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya lintas Daerah kabupaten/kota.	dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. b. usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah kabupaten/kota.
11.	Persampahan	a. Penerbitan izin insenerator pengolah sampah menjadi energi listrik. b. Penerbitan izin pemanfaatan gas metana (<i>landfill gas</i>) untuk energi listrik di tempat pemrosesan akhir (TPA) regional oleh pihak	Penanganan sampah di TPA/TPST regional.	a. Pengelolaan sampah. b. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. c. Pembinaan dan

NO	SUB BIDANG	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
		swasta. c. Pembinaan dan pengawasan penanganan sampah di TPA/tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) regional oleh pihak swasta. d. Penetapan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah. e. Pembinaan dan pengawasan tanggung jawab produsen dalam pengurangan sampah.		pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Misi dan Visi.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Strategi merupakan aturan atau arahan untuk mencapai misi dan tujuan yang dapat meliputi kegiatan atau program secara keseluruhan. Strategi dibangun melalui pemanfaatan semua kekuatan (sumberdaya) dan peluang secara optimal serta memperhatikan semua kelemahan dan ancaman sebagai bahan koreksi. Strategi merupakan cara mencapai tujuan dengan memanfaatkan semua kelebihan dan meminimumkan kelemahan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman/pegangan/ petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi instansi pemerintah. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Tabel berikut menyajikan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Berikut indikator sasaran, dan target kinerja sasaran untuk 2 tahun ke depan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, sehingga bisa dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah DLH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN 2025
Tujuan 1 : Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Terkendalinya Kualitas Air dan Udara	Tujuan 1 : Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	57,84
		Tujuan 2 : Nilai Adipura	Nilai	75
		Sasaran : Indeks Kualitas Air	Point	71,30
		Sasaran : Indeks Kualitas Udara	Point	55,63
		Sasaran : Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Ha	38,81
	Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung	Sasaran : Persentase Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung yang dikonservasi	%	0,3
	Meningkatnya Pelayanan Persampahan	Sasaran : Persentase Cakupan Layanan pengelolaan Sampah	%	4,17
Tujuan 2 : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Tujuan : Predikat SAKIP di lingkup perangkat daerah	Nilai	A

		Sasaran : Nilai SAKIP di lingkup Perangkat Daerah	Nilai	83,20
		Sasaran : Kepatuhan Pengeloan Keuangan	%	95
		Sasaran : Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK/ltda	%	91
		Sasaran : Jumlah Inovasi Perangkat Daerah yang ditetapkan menjadi inovasi daerah (tingkat kematangan inovasi > 100)	Inovasi	1
Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkup Perangkat Daerah	Tujuan : Indeks Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Indeks	3,55
		Sasaran : Survey Kepuasan Masyarakat Di Lingkup Perangkat Daerah	Nilai	88,75

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Visi pembangunan sebagaimana tertuang dalam dalam RPJPD Kota Bogor 2005-2025 adalah:

“Kota Jasa yang Nyaman dengan masyarakat Madani dan Pemerintah Amanah”

Yang dimaksud dengan :

1. Kota Jasa mengandung pengertian bahwa Kota Bogor menjadi pusat jasa dalam pengertian pelayanan (*services*) dan sektor ekonomi tersier (*economic activities*). Kota Bogor akan diarahkan untuk menjadi suatu kota yang aktivitas masyarakatnya bergerak terutama di sektor jasa. Sektor jasa merupakan sektor yang mendukung bagi berkembangnya aktivitas-aktivitas yang ada di masyarakat baik aktivitas budaya, ekonomi, penataan fisik kota, maupun penanganan masalah kota. Sektor ini perlu diprioritaskan untuk mendorong perekonomian Kota Bogor, terutama pada sub sektor jasa perdagangan, hotel dan restoran, jasa angkutan dan komunikasi, jasa keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, jasa pendidikan serta jasa-jasa lainnya;
2. Nyaman berarti bahwa Kota Bogor diharapkan menjadi kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan;
3. Masyarakat madani berarti bahwa masyarakat Kota Bogor harus memiliki derajat kualitas kehidupan yang tinggi baik dari segi keimanan, pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan daya beli masyarakat yang tercermin dari tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terutama dari Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), dan daya beli masyarakat (Purchasing Power Parity);
4. Pemerintahan amanah yaitu pemerintahan yang baik yang senantiasa mengacu kepada kepentingan masyarakat. Hal ini ditandai dengan

terwujudnya pelayanan publik yang prima di segala bidang serta terbukanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Bogor.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas maka ditetapkan Misi Pemerintah Kota Bogor sebagai berikut:

1. Mengembangkan perekonomian masyarakat dengan titik berat pada jasa yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada adalah pembangunan diarahkan pada peningkatan kemampuan ekonomi rakyat yang memprioritaskan pembangunan ekonomi dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Pengembangan sektor jasa agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing.
2. Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman (beriman) dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan, adalah pembangunan diarahkan kepada penampilan kota yang bersih, indah, tertib dan aman serta berwawasan lingkungan. Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkotaan akan terus ditingkatkan untuk dapat mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga masyarakat kota dapat merasakan kenyamanan kotanya.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang beriman, berketerampilan, sehat, cerdas dan sejahtera adalah pembangunan yang diarahkan kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga masyarakat Kota Bogor memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi dengan tetap memiliki kadar keimanan disertai keterampilan yang memadai agar mampu menjadi masyarakat mandiri.
4. Mewujudkan pemerintahan kota yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi supremasi hukum, adalah penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab dengan menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dan Clean Government, sehingga mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat disertai penegakan supremasi hukum.

Berpedoman pada visi dan misi RPJPD dan berdasarkan hasil evaluasi RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2023 serta memperhatikan RPJMN 2020-

2024 dan RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, Pemerintah Kota Bogor merekonstruksi pencapaian visi RPJPD dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Bogor 2025-2026. Berdasarkan pertimbangan dari visi dan misi RPJPD Kota Bogor 2005-2025 dan berdasarkan pada analisis Arah Kebijakan RPJPD Tahap IV, RPD Kota Bogor 2025-2026 serta memperhatikan isu strategis Kota Bogor, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Renstra Dinas Lingkungan Kota Bogor 2025-2026 sebagai berikut :

Rumusan pernyataan Tujuan Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup sebagai berikut :

1. Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel serta tata kelola pelayanan publik yang berkualitas

Adapun sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Lingkungan Hidup adalah:

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Meningkatnya konservasi Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Lindung
3. Meningkatnya Pelayanan Persampahan
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Mengacu kepada kerangka di atas, dalam upaya mewujudkan visi dan misi terkait khusus urusan Lingkungan Hidup, serta, berangkat dari pandangan, harapan dan permasalahan yang ada, Dinas LH Kota Bogor, memfokuskan kepada pencapaian dua tujuan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah di atas, yaitu: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, dimana diterjemahkan dalam bidang lingkungan hidup dengan meningkatkan kualitas air dan udara, melalui Indikator Kinerja Organisasi: Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana ditetapkan diatas yang menjadi tupoksi Dinas LH ditetapkan ada 5 sasaran yaitu:

1. Meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perilaku Hidup Bersih dan Sehat adalah Persentase Rumah Tangga Ber-PHBS.

2. Meningkatnya kualitas lingkungan sehat di kawasan perumahan dan permukiman

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas lingkungan sehat di Kawasan perumahan dan permukiman adalah : persentase reduksi sampah.

3. Terkendalinya sumber-sumber pencemar air

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar air adalah Indeks Kualitas Air.

4. Terkendalinya sumber sumber pencemar udara

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait terkendalinya sumber-sumber pencemar udara adalah Indeks Kualitas udara.

5. Meningkatkan Kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kualitas ruang terbuka hijau public perkotaan adalah persentase RTH Publik.

Berdasarkan upaya pencapaian misi, Dinas Lingkungan Hidup secara langsung terkait dengan misi 1 (satu) melalui 9 (Sembilan) program yaitu : (1) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, (2) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, (3) Program Pengendalian bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3), (4) Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PPLH, (5) Program Peningkatan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat, (6) Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat, (7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, (8) Program Pengelolaan Persampahan dan (9) Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional, (10) Program Perencanaan Lingkungan dan (11) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Setelah dilakukan pemetaan sesuai Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 maka disepakati bahwa dalam Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2021 terdiri dari 11 program 17 kegiatan,

dan 34 sub kegiatan yang telah sesuai dengan kodefikasi, klasifikasi dan nomenklatur dalam Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020.

Total Kebutuhan dana/Pagu Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 adalah sebesar Rp. 125.922.436,739,- (Seratus dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh Sembilan rupiah)

Pelaksanaan kegiatan RKPD Tahun 2025 harus dilakukan secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan upaya keterpaduan dan sinergitas antar satuan kerja, satuan kerja dengan kabupaten/kota maupun satuan kerja dengan masyarakat pada umumnya. Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi maupun penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipasi serta monitoring dan evaluasi. Bagi satuan kerja pelaksana program, RKPD Tahun 2025 yang ditindaklanjuti dengan menyusun kebijakan publik baik dalam kerangka deregulasi maupun kerangka anggaran dalam APBD Tahun 2025 yang dalam pelaksanaannya dengan memaksimalkan sumber daya yang ada terutama sumber daya anggaran.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Bogor sebagaimana tercantum dalam Tabel T-C.33:

Tabel 3.3. (T-C.33)
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025
dan Perkiraan Maju Tahun 2025
Provinsi/Kabupaten/Kota Bogor

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	4,17%	6.427.631.840	APBD		4,17%	14.805.983.440
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi		2,13%				5,84%	
		Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan		98,16%				98,16%	
		Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi		100%				100%	
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	Kota Bogor	100%	6.427.631.840	APBD		100%	14.805.983.440
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	Kota Bogor	541,76 Ton	290.000.000	APBD		547,18 Ton	330.000.000
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	Kota Bogor	546,50 Ton/hari	1.298.460.371	APBD		550,05 Ton/hari	9.636.811.971
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	Kota Bogor	10 Unit	400.000.000	APBD		15 Unit	400.000.000

4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	Kota Bogor	130 Unit	4.439.171.469	APBD		150 Unit	4.439.171.469
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	Kota Bogor	100%	262.000.000	APBD		100%	
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Kota Bogor	1 Dokumen	262.000.000	APBD		1 Dokumen	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Kota Bogor	1 Dokumen	262.000.000	APBD		1 Dokumen	262.000.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	20%	1.148.977.520	APBD		25%	262.000.000
		Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	Kota Bogor	8%				8,3%	262.000.000
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air	Kota Bogor	13,88%	1.048.977.520	APBD		13,88%	1.148.977.520
		Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	Kota Bogor	11 Titik				11 Titik	
		Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	Kota Bogor	3 Lokasi				3 Lokasi	1.048.977.520
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kota Bogor	2 Dokumen	150.000.000	APBD		2 Dokumen	
7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	1 Dokumen	898.977.520	APBD		1 Dokumen	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	Kota Bogor	1 Laporan	100.000.000	APBD		1 Laporan	150.000.000

8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kota Bogor	1 Kegiatan	100.000.000	APBD		1 Kegiatan	898.977.520
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	Kota Bogor	0,5 Ha	150.000.000	APBD		0,5 Ha	150.000.000
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Pohon yang ditanami	Kota Bogor	500 Pohon	150.000.000	APBD		500 Pohon	150.000.000
9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Kota Bogor	1 Dokumen	150.000.000	APBD		1 Dokumen	150.000.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	Kota Bogor	100%	154.072.500	APBD		100%	250.000.000
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	Kota Bogor	93%	154.072.500	APBD		93%	250.000.000
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kota Bogor	2 Laporan	154.072.500	APBD		2 Laporan	250.000.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Kota Bogor	56,32%	170.000.000	APBD		57,45%	170.000.000
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	Kota Bogor	100%	170.000.000	APBD		100%	170.000.000
11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kota Bogor	36 Badan/ Usaha	170.000.000	APBD		48 Badan/ Usaha	170.000.000
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	15%	445.730.300	APBD		15,3%	545.730.300

	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	Kota Bogor	35 Pelaku kegiatan/usaha	445.730.300	APBD		40 Pelaku kegiatan/usaha	545.730.300
		Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup		25 Lembaga				30 Lembaga	
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kota Bogor	50 Dokumen	95.730.300	APBD		40 Dokumen	95.730.300
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Kota Bogor	250 Orang	150.000.000	APBD		300 Orang	200.000.000
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Kota Bogor	25 Lembaga	200.000.000	APBD		30 Lembaga	250.000.000
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	Kota Bogor	35,60%	500.000.000	APBD		35,70%	500.000.000
		Persentase Rukun Tetangga peduli Lingkungan		19%				19,10%	
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	500.000.000	APBD		784 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	500.000.000
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kota Bogor	5 Entitas	500.000.000	APBD		5 Entitas	500.000.000
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	Kota Bogor	100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	Kota Bogor	100%	30.000.000	APBD		100%	30.000.000

16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Bogor	10 Pengaduan	30.000.000	APBD		12 Pengaduan	30.000.000
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Reduksi Sampah (%)	Kota Bogor	8%	10.347.251.100	APBD		8,1%	28.322.094.000
		Persentase Volume Sampah Tertangani		79,25%				79,5%	
		Persentase Jalur Wilayah Penyapuan		94,97%				97,5%	
		Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan		2,9%				3%	
	Pengelolaan Sampah	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	Kota Bogor	57,58%	10.347.251.100	APBD		58,73%	28.322.094.000
		Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah		94%				95%	
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	8 unit	6.411.065.600	APBD		9 Unit	7.127.448.000
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Kota Bogor	4427,49 ton/tahun	1.025.752.000	APBD		4471,76 Ton/tahun	1.145.286.000
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kota Bogor	8 unit	2.910.433.500	APBD		9 Unit	20.049.360.000
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	Kota Bogor	27,01	109.346.203.179			27,34	109.346.203.179
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja		26,55				26,82	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja		12,48				13,00	
		Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal		21,97				21,98	
		Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah		100				100	
		Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu		100				100	

		Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan		94			94	
		Persentase Kepatuhan Anggaran		100			100	
		Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA		95			95	
		Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah		94			94	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana		87,11			87,87	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM		88,75			89,25	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan		88,38			89,39	
		Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan		88,38			89,39	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	Kota Bogor	100%	170.000.000	APBD	100%	170.000.000
		Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun		100%			100%	
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	5 Laporan	170.000.000	APBD	5 Laporan	170.000.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	Kota Bogor	100%	33.584.485.984	APBD	100%	33.584.485.984
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	265 Orang/Bulan	33.474.565.984	APBD	265 Orang/Bulan	33.474.565.984
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	109.920.000	APBD	1 Laporan	109.920.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	Kota Bogor	100%	1.855.291.700	APBD	100%	1.848.207.700
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	1 Paket	856.776.000	APBD	1 Paket	856.776.000
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kota Bogor	5 Paket	97.029.900	APBD	5 Paket	89.945.900
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	3 Paket	401.840.000	APBD	3 Paket	401.840.000
26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bogor	2 Paket	119.999.800	APBD	2 Paket	119.999.800

27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	1 Laporan	379.646.000	APBD		1 Laporan	379.646.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBM	Kota Bogor	100%	428.199.800	APBD		100%	565.207.900
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bogor	5 Unit	428.199.800	APBD		5 Unit	565.207.900
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Kota Bogor	100%	44.004.387.039	APBD		100%	44.004.387.039
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	345.955.000	APBD		12 Laporan	345.955.000
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bogor	12 Laporan	43.658.432.039	APBD		12 Laporan	43.658.432.039
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	Kota Bogor	100%	26.244.408.956	APBD		100%	29.173.914.556
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kota Bogor	140 Unit	26.046.430.831	APBD		145 Unit	26.046.430.831
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bogor	1 Unit	8.690.731	APBD		1 Unit	258.690.731
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Kota Bogor	10 Unit	189.287.394	APBD		10 Unit	189.287.394
					125.922.436.739				155.530.988.439

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Seluruh kegiatan yang dikembangkan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi.

Dalam membuat rencana program dan kegiatan ini, pada dasarnya jenis belanja yang akan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terbagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu Belanja Tidak Langsung yang meliputi gaji dan tunjangan bagi pegawai serta Belanja Langsung yang merupakan belanja dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas. Untuk membiayai kedua jenis belanja tadi, Dinas Lingkungan Hidup menggunakan Dana APBD Kota Bogor.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yaitu :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

1. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional
 - 1) Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - 2.1 Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.2 Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.3 Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 - 2.4 Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS
 2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
-

-
- 2) Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
Sub Kegiatan :
 - a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
 3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup
 - 1) Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut
 - b) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 2) Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi
 4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
 - 1) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
 - a) Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
 5. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun (Limbah B3)
 - 1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
Sub Kegiatan :
 - a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (PPLH)
 - 1) Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan :
-

-
- a) Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan
 - b) Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
 - c) Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
- 1) Kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan :
- a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 1) Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota
- Sub Kegiatan :
- a) Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota
10. Program Pengelolaan Persampahan
- 1) Kegiatan Pengelolaan Sampah
- Sub Kegiatan :
- a) Pengurangan Sampah Melalui Pemanfaatan Kembali Sampah
 - b) Penanganan Sampah Melalui Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah
-

-
- c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

11. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 4) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - 5) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - 6) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Sub Kegiatan :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - b) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
-

c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Tabel 4.1. Renja 2025 Dinas Lingkungan Hidup

NO	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Ket
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
I	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Kota Bogor	Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	4,17%	6.427.631.840	Bidang Pengelolaan Persampahan
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang direhabilitasi	2,13%		
			Persentase TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	98,16%		
			Persentase Sarana persampahan yang terpenuhi	100%		
	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Peningkatan sarana dan prasarana persampahan	100%	6.427.631.840	
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dibangun	541,76 Ton	290.000.000	
2	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Kapasitas TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang ditingkatkan	546,50 Ton/hari	1.298.460.371	
3	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kota Bogor	Jumlah TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang dioptimalisasi	10 Unit	400.000.000	
4	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS3-R/ TPS	Kota Bogor	Jumlah Sarana Pendukung TPA/ TPST/ SPA/ TPS-3R/ TPS yang di sediakan	130 Unit	4.439.171.469	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					

II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase rencana pembangunan daerah yang telah sinergis dengan RPPLH dan KLHS	100%	262.000.000	Bidang Tata Lingkungan
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Dokumen RPPLH yang disusun tepat waktu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	1 Dokumen	262.000.000	
5	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/ kota yang berisi arahan/ muatan RPPLH kabupaten/ kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	1 Dokumen	262.000.000	
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Air yang memenuhi baku mutu	20%	1.148.977.520	Bidang PPLKPI
		Kota Bogor	Persentase Parameter Kualitas Udara yang memenuhi baku mutu	8%		
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase pemenuhan baku mutu kualitas air	13,88%	1.048.977.520	
		Kota Bogor	Jumlah Titik Pengujian Kualitas Udara Ambien	11 Titik		
		Kota Bogor	Jumlah Pembinaan kampung iklim kota Bogor	3 Lokasi		
6	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen	150.000.000	

7	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen	898.977.520	
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kajian Rehabilitasi Lingkungan	1 Laporan	100.000.000	
8	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kota Bogor	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 Kegiatan	100.000.000	
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Kota Bogor	Luas kawasan perlindungan setempat, pelestarian alam, kawasan rawan bencana dan pengembangan keanekaragaman hayati yang dikonservasi (Ha)	0,5 Ha	150.000.000	Bidang PPLKPI
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pohon yang ditanami	500 Pohon	150.000.000	
9	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Kota Bogor	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	1 Dokumen	150.000.000	
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Kota Bogor	Persentase Kegiatan Usaha yang Memenuhi Pengelolaan Limbah B3	100%	154.072.500	Bidang PPLKPI
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Persentase pemantauan kepada pelaku usaha terkait limbah B3	93%	154.072.500	
10	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Kota Bogor	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	2 Laporan	154.072.500	
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Kota Bogor	Persentase Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	56,32%	170.000.000	Bidang PPLKPI

	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Persentase Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Usaha/Kegiatan	100%	170.000.000	
11	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	36 Badan/Usaha	170.000.000	
VII	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Kelompok Masyarakat/Lembaga/kegiatan Usaha yang dibina dalam pengelolaan Lingkungan Hidup	15%	445.730.300	Bidang Tata Lingkungan
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Pelaku Kegiatan/usaha yang sudah dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan	35 Pelaku kegiatan/usaha	445.730.300	
			Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang mengikuti pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Lingkungan Hidup	25 Lembaga		
12	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	50 Dokumen	95.730.300	
13	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	250 Orang	150.000.000	
14	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Kota Bogor	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	25 Lembaga	200.000.000	
VIII	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Kota Bogor	Persentase Sekolah Adiwiyata (%)	35,60%	500.000.000	Bidang Tata Lingkungan
			Persentase Rukun Tetangga	19%		

			peduli Lingkungan			
	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah RT/ Masyarakat/ Lembaga Masyarakat / Dunia Usaha/ Sekolah yg mengikuti Penilaian Kinerja dalam Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup	783 RT/ Dunia Usaha/ Sekolah/ Kelompok Masyarakat	500.000.000	
15	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Bogor	Jumlah Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/ Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	5 Entitas	500.000.000	
IX	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran / kerusakan Lingkungan Hidup yang ditindak lanjuti	100%	30.000.000	Bidang PPHL
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di bidang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) Kabupaten/kota	Kota Bogor	Persentase pengaduan masyarakat terhadap ketaatan Kegiatan dan/atau Usaha atas upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan dokumen yang berakibat pada dugaan adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	100%	30.000.000	
16	Pengelolaan Pengaduan masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	10 Pengaduan	30.000.000	
X	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Kota Bogor	Persentase Reduksi Sampah (%)	8%	10.347.251.100	Bidang Pengelolaan Persampahan
			Persentase Volume Sampah Tertangani	79,25%		
			Persentase Jalur Wilayah Penyapuan	94,97%		
			Persentase Peningkatan Retribusi Persampahan	2,9%		

	Pengelolaan Sampah	Kota Bogor	Persentase Jumlah sampah yang dikelola di TPS 3R	57,58%	10.347.251.100	
			Persentase Pengelolaan sampah an organik yang dikelola di Bank Sampah	94%		
17	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	6.411.065.600	
18	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kota Bogor	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	4427,49 ton/tahun	1.025.752.000	
19	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	8 unit	2.910.433.500	
XI	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kota Bogor	Nilai Sakip Aspek Perencanaan Kinerja	27.01	106.286.773.479	Sekretariat
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pengukuran Kinerja	26.55		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Pelaporan Kinerja	12.48		
			Rata Rata Nilai Sakip Aspek Evaluasi Internal	21.97		
			Persentase realisasi rencana tindak pengendalian resiko di lingkungan perangkat daerah	100		
			Persentase penyampaian laporan keuangan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan secara tepat waktu	100		
			Persentase Pengelolaan BMD yang dikelola sesuai dengan ketentuan	94		
			Persentase Kepatuhan Anggaran	100		
			Persentase Realisasi anggaran terhadap DPA	95		

			Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	94		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Sarana prasarana	87.11		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan kualitas SDM	88.75		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Pemenuhan Persyaratan, Prosedur, Waktu, Tarif, dan Standar layanan	88.38		
			Rata Rata Nilai SKM Aspek Penanganan Pengaduan	88.38		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase dokumen perencanaan yang disusun	100%	170.000.000	
			Persentase dokumen Evaluasi Kinerja dan Pelaporan yang disusun	100%		
20	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Bogor	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	170.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase Berita Acara Rekonsiliasi yang dilaksanakan sesuai standar akuntansi	100%	33.584.485.984	
21	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bogor	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	265 Orang/Bulan	33.474.565.984	
22	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	1 Laporan	109.920.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Bogor	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.855.291.700	
23	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	856.776.000	
24	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Bogor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	97.029.900	
25	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Bogor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	401.840.000	

26	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Bogor	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	119.999.800	
27	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	379.646.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana penunjang urusan pemerintahan sesuai RKBMD	100%	428.199.800	
28	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5 Unit	428.199.800	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase Pemenuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	44.004.387.039	
29	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	345.955.000	
30	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Bogor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	43.658.432.039	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Bogor	Persentase BMD lingkup perangkat daerah berkondisi baik	100%	26.244.408.956	
31	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Bogor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	140 Unit	26.046.430.831	
32	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	8.690.731	
33	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kota Bogor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10 Unit	189.287.394	
			JUMLAH		125.922.436.739	

BAB V P E N U T U P

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Tahun 2025 yang merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan, program dan arah kebijakan selama jangka waktu 1 (satu) tahun, juga akan menjadi acuan untuk evaluasi kinerja melalui pengukuran kinerja Instansi/Organisasi, berdasar pada data realisasi dan tingkat pencapaian target yang dapat dipertanggungjawabkan baik di lapangan (fisik) maupun secara administrasi. Telah menjadi komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dengan tetap mengacu kepada dokumen perencanaan yang telah disusun.

Penyusunan Renja ini secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Diharapkan Renja ini dapat bermanfaat sebagai pedoman operasional bagi aparat Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dan diperlukan konsistensi dan disiplin yang kuat dari setiap pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor untuk merealisasikan Rencana Kerja ini agar terciptanya Kota Bogor yang bersih, nyaman dan berwawasan lingkungan.